

RUKUN DAN TENTRAM DALAM BERDEMOKRASI

Tahun 2024 merupakan tahun penting untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia, bulan maret kemarin kita sudah melaksanakan pesta demokrasi terbesar di Indonesia yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden, di susul pemilihan anggota legislatif dan giliran ke masing-masing daerah untuk menentukan pilihannya bupati dan wakil bupati. Kondisi masyarakat di harapkan tetap bisa menjaga kerukunan dan ketentraman walaupun berbeda pilihan.

Masyarakat Gunungkidul menjadi salah satu yang menentukan nasib bangsa ke depan, warga masyarakat yang masih sangat kental dengan tradisi gotong royong dan menjunjung tinggi budayanya. Ketika orang luar gunungkidul berkunjung ke gunungkidul maka akan terkesan dengan kebiasaan warga masyarakat gunungkidul yang masih menjunjung kebersamaan dalam gotong royong yg perwujudannya sangat beraneka ragam, baik itu kerjabhakti Bersama, sambatan, gugur gunung, dan lainnya.

Umat Buddha di Kabupaten Gunungkidul terkonsentrasi di kapanewon panggang, Wonosari dan Semin, selain menjunjung nilai-nilai tradisi dan budaya luhur yang masih dipertahankan mereka juga sangat aktif dalam kegiatan keagamaan, malam selasa kliwonan misalnya, sebuah kebiasaan yang sudah mengakar dan masih di pertahankan sampai sekarang, dijadikan sebagai ajang silaturahmi dan juga ngangsu kawruh tentang budaya dan keagamaan, maka tidak menjadi masalah Ketika event 5 tahunan yaitu pemilu Bupati dan Wakil Bupati di selenggarakan dan yang menjadi subyeknya adalah warga masyarakat gunungkidul yang sudah tau betul bagaimana tetap menjaga kebersamaan dan kerukunan, walaupun nantinya pilihan mereka akan berbeda-beda.

Terdapat bukti yang kuat bahwa agama Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke 4 M dengan ditemukannya Buddharupang dari perunggu di Sempaga (Sulawesi Selatan). Buddharupang ini merupakan bukti tertua adanya pengaruh budaya India di Indonesia. Penemuan Buddharupang itu juga sangat penting sebab memberikan petunjuk kepada kita ketinggian taraf hidup dan budaya rakyat Indonesia pada waktu itu. Dilihat dari ciri-cirinya, Buddharupang tersebut diperkirakan berasal dari langgam Amarawaturupang, India Selatan (abad 2-5 SM).

Ada kemungkinan bahwa rupang ini merupakan barang dagangan atau mungkin juga barang persembahan sesuai bangunan suci agama Buddha. Rupang sejenis juga ditemukan di Jember, Jawa Timur dan di Bukit Siguntang, Sumatra Selatan. Adapun di Kutai, Kalimantan Timur ditemukan Buddharupang yang memperlihatkan rupang seni Gandhara, India Utara.

Perwujudan akulturasi antara kebudayaan Buddha dengan kebudayaan Indonesia antara lain.

1. Seni Rupa dan Seni Ukir: Akulturasi di bidang seni rupa dan seni ukir terlihat pada Candi Borobudur yang berupa relief Sang Buddha Gautama (pengaruh dari Buddha) dan relief perahu bercadik, perahu besar tidak bercadik, perahu lesung, perahu kora kora, dan rumah panggung yang di atapnya terdapat burung bertengger (asli Indonesia).
2. Aksara dan Seni Sastra: Pengaruh budaya baca dan tulis aksara, huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta.
3. Sistem Pemerintahan: Pengaruh budaya India memunculkan pemerintahan yang dipegang oleh raja. Raja tidak lagi sebagai wakil dari nenek moyang, tetapi sebagai penjelmaan dewa di dunia sehingga muncul kultus "dewa raja".

Beberapa akulturasi budaya ini yang menjadi salah satu dasar perkembangan kebiasaan, mewujudkan masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi kebudayaan sehingga tercipta masyarakat yang tentram, rukun dan sejahtera.

Ajaran Buddha mengajarkan prinsip-prinsip yang mendukung kerukunan dan demokrasi, yang relevan dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, menekankan pentingnya cinta kasih universal dan toleransi antarumat beragama, yang dapat menciptakan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendekatan agama Buddha terhadap politik adalah moral dan tanggung jawab penggunaan kekuatan masyarakat. Sang Buddha berkhotbah tanpa kekerasan. Kedamaian sebagai pesan universal. Beliau tidak menyetujui kekerasan atau penghancuran kehidupan. Sabda Buddha "Yang menang melahirkan kebencian, yang kalah hidup dalam kesedihan. Barang siapa yang melepaskan keduanya baik kemenangan dan kekalahan akan berbahagia dan damai".



Dalam kitab Jataka, Sang Buddha telah memberikan sepuluh aturan untuk pemerintahan yang baik (Dasa Rajadhamma). Kesepuluh aturan ini dapat diterapkan oleh pemerintahan manapun yang berharap dapat mengatur negaranya. Peraturan-peraturan tersebut sebagai berikut.

- 1) Bersikap bebas/tidak picik dan menghindari sikap mementingkan diri sendiri.
- 2) Memelihara suatu sifat moral tinggi.
- 3) Siap mengorbankan kesenangan sendiri bagi kesejahteraan rakyat.
- 4) Bersikap jujur dan menjaga ketulusan hati.
- 5) Bersikap baik hati dan lembut.
- 6) Hidup sederhana sebagai teladan rakyat.
- 7) Bebas dari segala bentuk kebencian.
- 8) Melatih tanpa kekerasan.
- 9) Mempraktikkan kesabaran, dan
- 10) Menghargai pendapat masyarakat untuk meningkatkan kedamaian dan harmoni.

Sang Buddha memberi nasihat tentang perilaku penguasa.

- 1) Seorang penguasa yang baik harus bersikap tidak memihak dan tidak berat sebelah terhadap rakyatnya.
- 2) Seorang penguasa yang baik harus bebas dari segala bentuk kebencian terhadap rakyatnya.
- 3) Seorang penguasa yang baik harus tidak memperlihatkan ketakutan apa pun dalam penyelenggaraan hukum jika itu dapat dibenarkan.
- 4) Seorang penguasa yang baik harus memiliki pengertian yang jernih akan hukum yang diselenggarakan. Hukum harus diselenggarakan tidak hanya karena penguasa mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan hukum dan dikerjakan dalam suatu sikap yang masuk akal dan dengan pikiran sehat (Cakkavati Sihananda Sutta).

Dalam suatu cerita Jataka, disebutkan bahwa seorang penguasa yang menghukum orang yang tidak bersalah dan tidak menghukum orang telah melakukan kejahatan tidak cocok untuk mengatur suatu negara. Raja yang selalu memperbaiki dirinya sendiri dan secara hati-hati memeriksa tingkah lakunya baik perbuatan, ucapan, maupun pikiran mencoba untuk menemukan dan mendengar pendapat publik apakah dia telah bersalah atau tidak dalam mengatur kerajaannya. Jika ditemukan bahwa dia telah mengatur secara tidak benar, masyarakat akan mengeluh bahwa mereka telah dihancurkan oleh penguasa yang jahat dengan perlakuan yang tidak adil, hukuman, pajak, atau tekanan-tekanan lain, termasuk korupsi dalam segala bentuk dan mereka akan bereaksi menentangnya dalam satu atau lain cara. Sebaliknya, jika seorang penguasa mengatur dengan cara yang benar mereka akan memberkahinya dengan "Panjang umur Yang Mulia" (Majjhima Nikaya).

